



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BADUNG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127,00	10.286.053.757.967,00	1.702.967.207.840,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314,00	9.289.161.451.514,00	1.448.818.961.200,00
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00	394.287.249.133,00	76.209.917.924,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	27.391.025.423,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00	365.795.960.044,00	150.547.303.293,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,00	1.004.343.911.592,00	243.813.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00	834.100.838.000,00	243.813.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00	170.243.073.592,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	9.591.122.648.719,00	11.294.333.669.559,00	1.703.211.020.840,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.717.700.125,00	6.963.493.780.197,00	1.093.776.080.072,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327,00	2.360.353.016.303,00	-86.033.365.024,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710,00	2.014.012.734.964,00	80.353.256.254,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.413.200.000,00	6.413.200.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00	2.581.876.828.930,00	1.099.744.688.842,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	838.000.000,00	-288.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.108.154.868.789,00	2.567.102.517.126,00	458.947.648.337,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645,00	618.455.576.245,00	199.517.295.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00	386.266.840.935,00	170.328.101.813,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504,00	676.483.376.984,00	38.853.588.480,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00	870.941.881.451,00	49.372.793.739,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00	14.563.566.511,00	872.328.705,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00	391.275.000,00	3.540.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627,00	2.528.348.610.474,00	935.298.908.847,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00	1.268.041.922.490,00	373.655.272.251,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00	1.260.306.687.984,00	561.643.636.596,00
	Jumlah Belanja	9.643.008.303.787,00	11.198.645.998.950,00	2.490.936.604.910,00
	Total Surplus/(Defisit)	-51.885.655.068,00	-839.611.238.238,00	-787.725.583.170,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00	983.909.492.620,00	882.023.837.552,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	892.023.837.552,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	154.298.254.382,00	104.298.254.382,00
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	154.298.254.382,00	104.298.254.382,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	154.298.254.382,00	104.298.254.382,00
	Pembiayaan Netto	51.885.655.068,00	839.611.238.238,00	787.725.583.170,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SLPA)	0,00	0,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, BALI KODE POS : 80351 TELP. (0361) 9009333

Nomor : 900/15983/SETDA/BPKAD

Mangupura, 24 Juli 2024

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Pedoman Penyusunan Perubahan
RKA-SKPD T.A. 2024

- Sdr. :1. Inspektur, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala
Satuan, Kepala Bagian
Setda. Kab.Badung di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung.
2. Sekretaris DPRD
Kabupaten Badung.
3. Para Camat se-
Kabupaten Badung.
di –

tempat

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah disepakatinya Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, dengan ini disampaikan kepada saudara agar segera menyusun Perubahan RKA – SKPD dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum dalam penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPKD Perubahan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/054fbf4fd704192492304c1068d49e50>

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 21);

B. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Dalam Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024 agar tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor : 900/11991/SETDA/BPKAD, Perihal : Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.
 2. Pergeseran Anggaran dan penyempurnaan kode rekening belanja dalam sub kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu sub kegiatan dan harus memperhatikan realisasi belanja yang akan dilakukan pergeseran.
 3. Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan agar memperhitungkan kebutuhan dari anggaran yang tersedia dan memperhatikan realisasi anggaran.
 4. Bagi Perangkat Daerah Penghasil dan Pengelola Pembiayaan supaya membuat Perubahan RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPKD dan menyampaikan Rekapitulasi Pendapatan dan Pembiayaan tersebut.
 5. Perubahan RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPKD agar disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2024 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
- Demikian untuk mendapat pelaksanaan sebagaimana mestinya.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
I Wayan Adi Arnawa, SH
NIP.196603091995031002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Badung (sebagai laporan) di Mangupura
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
3. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/054fbf4fd704192492304c1068d49e50>